

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PADA DESA RUMAH BERASTAGI  
KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
RIAN RENALDI  
198520159**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PADA DESA RUMAH BERASTAGI  
KECAMATAN BERASTAGI KABUPATEN KARO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**



**OLEH:  
RIAN RENALDI  
198520159**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)2/5/24

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan  
Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan  
Berastagi Kabupaten Karo

Nama Mahasiswa : Rian Renaldi

NPM : 198520159

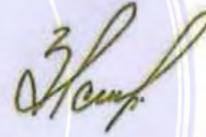
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing



Dr. Budi Hartono, M.Si

Pembimbing I



Beltahmamero Simamora, S.IP, M.PA

Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP

Dekan



Drs. Indra Muda, MAP

Kaprodi

Tanggal Lulus : 22 Februari 2024

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Renaldi

NPM : 198520159

Tempat/Tanggal Lahir : Berastagi 16 November 2000

Alamat : Jl Jamin Ginting Simpang Ujung Aji Berastagi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo " adalah hasil pelaksanaan penelitian saya dan seluruh ide, pendapat, dan materi dari sumber lain telah dikutip berdasarkan penulisan sumber referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan yang saya urai diatas, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan termasuk pencabutan gelar Sarjana Administrasi Publik yang nanti saya peroleh.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Rian Renaldi  
NPM : 198520159  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, April 2024

  
Rian Renaldi

Npm. 198520159

## RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

1. Nama : Rian Renaldi
2. Alamat : Jl.Jamin Ginting Simpang Ujung  
Aji Berastagi
3. Tempat /Tanggal Lahir : Berastagi 16 November 2000
4. Jenis Kelamin : Laki Laki
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Menikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Nomor Telepon /HP : 085760086697
9. E-mail : rianrenaldigultom@gmail.com
10. Kode Pos : 22152

### PENDIDIKAN FORMAL

- 2006 - 2012 : SD Negeri 040455 Berastagi
- 2012 - 2015 : SMP Negeri 2 Berastagi
- 2015 - 2018 : SMA Swsasta Bersama Berastagi
- 2019 - Sekarang : Universitas Medan Area

### PENGALAMAN & ORGANISASI

- IMAMUGI ( Ikatan Mahasiswa Muslim Berastagi )  
Jabatan : -Kepala Bidang Kesenian dan Olahraga (2020)  
-Kepala Bidang Pendidikan (2022)
- PEMA FISIP UMA  
Jabatan : -Anggota Bidang Sebudol (2022)

## ABSTRAK

Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pembangunan desa, seperti pada Desa Rumah Berastagi. Desa Rumah Berastagi merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Karo yang memiliki 11 Dusun, dengan adanya pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung pembangunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi dengan menggunakan teori Mulyadi (2019) terdapat 4 indikator bentuk partisipasi yaitu Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam kemanfaatan, dan Partisipasi dalam evaluasi. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan infrastruktur di Desa ini sudah berjalan cukup baik dengan adanya kesadaran diri dalam masyarakat itu sendiri. Keberhasilan suatu pembangunan infrastruktur di Desa Rumah Berastagi ini dipengaruhi adanya faktor pendukung dari masyarakat desa tersebut.

**Kata kunci: Partisipasi, Pembangunan, Infrastruktur**

### **ABSTRAK**

*Community participation plays an important role in village development, such as in Rumah Berastagi Village. This study aims to determine community participation in infrastructure development and to find out what factors hinder and support the development of community participation in infrastructure development in Rumah Berastagi Village using Mulyadi's theory (2019) there are 4 indicators of forms of participation. The method used is descriptive qualitative method with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The success of an infrastructure development in Rumah Berastagi Village is influenced by the supporting factors of the village community.*

**Keywords: Participation, Development, Infrastructure**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area . Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang membantu skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Walid Musthafa S, S.Sos, M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs.Indra Muda, M.AP selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr.Budi Hartono, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, M.PA selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra.Nurhayati Harahap, M.AP selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Bapak Pebrisiswanta Purba selaku Kepala Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang sudah bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Herdison Surbakti selaku Sekretaris Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang sudah bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Iskandar A Purba selaku Sekretaris BPD Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo yang sudah bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendukung, mendoakan dan membimbing penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran atau kritik yang bersifat positif demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat baik bagi Pendidikan maupun masyarakat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Medan, April 2024

Rian Renaldi  
19852015

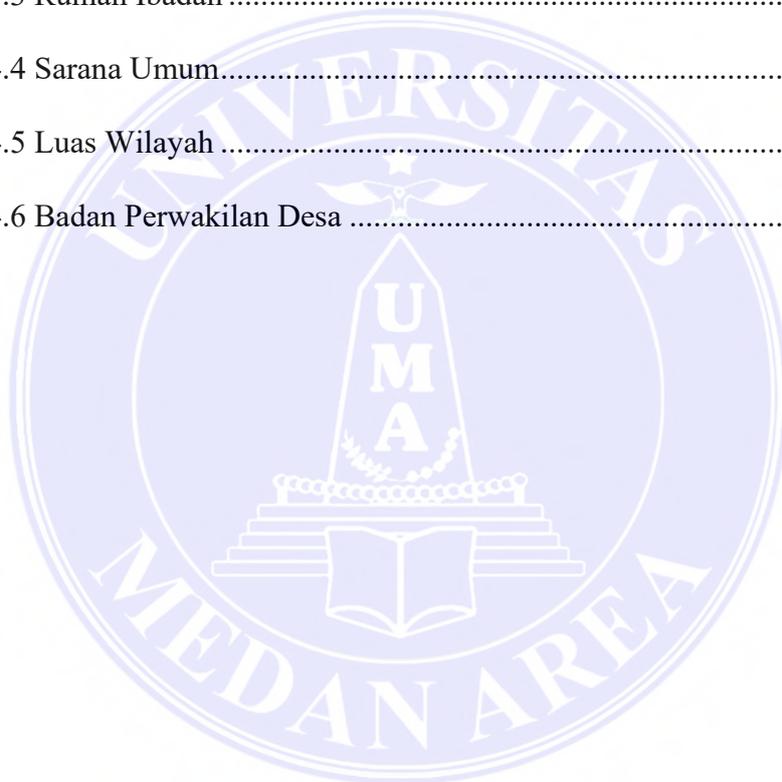
## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<i>Abstrak.....</i>	<i>vii</i>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Partisipasi Masyarakat.....	11
2.1.1 Pengertian Partisipasi.....	11
2.1.2 Pengertian Masyarakat.....	12
2.1.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat .....	14
2.1.4 Tingkatan partisipasi masyarakat. ....	18
2.1.5 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat.....	19
2.1.6 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat ..	21
2.2 Konsep Pembangunan Infrastruktur .....	23
2.2.1. Konsep Pembangunan .....	23
2.2.2 Konsep Infrastruktur .....	27
2.2.3 Konsep Pembangunan Infrastruktur.....	8
2.3 Konsep Desa .....	30
2.4 Penelitian Terdahulu .....	32
2.5 Kerangka Berfikir Peneliti .....	35
2.6 Defenisi Konsep dan Fungsional .....	37
2.6.1 Defenisi Konsep .....	37
2.6.2 Defenisi Operasional. ....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>11</b>
3.1 Metode Penelitian.....	11

3.2. Fokus penelitian .....	42
3.3. Informan Penelitian.....	42
3.4. Teknik pengumpulan data.....	43
3.5. Teknik analisis data.....	45
3.6. Lokasi dan jadwal penelitian .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Profil Desa.....	49
4.1.1 Sejarah Desa.....	49
4.1.2 Visi dan Misi Desa .....	51
4.1.3 Sejarah Pemerintahan Desa.....	52
4.1.4 Kondisi Umum Desa.....	53
4.1.5 Status Kepemilikan Lahan.....	55
4.1.8 Kondisi Ekonomi Desa .....	57
4.1.9 Pembagian Wilayah Desa .....	57
4.1.10 Pemerintahan Desa .....	59
4.2 Potensi dan Masalah .....	62
4.2.1 Potensi.....	62
4.2.2 Masalah .....	64
4.3 Deskripsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. ...	68
4.3.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan (Musyawarah) .....	68
4.3.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan .....	74
4.3.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Kemanfaatan.....	80
4.3.4 Partisipasi Pada Keikutsertaan Dalam Melakukan Evaluasi .....	84
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>102</b>
5.1 Kesimpulan .....	102
5.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....</b>	<b>109</b>
<b>Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian.....</b>	<b>110</b>
<b>Lampiran 3. Dokumentasi.....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Pembangunan Kabupaten Karo.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 4.1 Kepala Desa Rumah Berastagi .....	52
Tabel 4.2 Jalan .....	56
Tabel 4.3 Rumah Ibadah .....	57
Tabel 4.4 Sarana Umum.....	57
Tabel 4.5 Luas Wilayah .....	59
Tabel 4.6 Badan Perwakilan Desa .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka berfikir peneliti .....	38
Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi pemerintahan desa .....	61
Gambar 4.2 Kegiatan Musyawarah Desa dengan Masyarakat .....	74
Gambar 4.4 Kegiatan Masyarakat Ikut Dalam Membangun Jalan .....	80
Gambar 4.3 Masyarakat Bergotong Royong.....	84
Gambar 5.1 Kantor kepala Desa Rumah Berastagi .....	113
Gambar 5.2 Jalan Desa.....	114
Gambar 5.3 Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Rumah Berastagi.....	115
Gambar 5.4 Jamburtaras (aula atau jambur ) .....	116
Gambar 5.5 Sarana Olahraga .....	116
Gambar 5.6 Gapura Desa Rumah Berastagi.....	117
Gambar 5.7 Tempat Pembuangan Sampah di Desa Rumah Berastagi.....	117
Gambar 5.8 Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa.....	118
Gambar 5.9 Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris Desa .....	118
Gambar 5.10 Dokumentasi wawancara dengan Sekretaris BPD .....	119

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	109
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian .....	110
Lampiran 3 Dokumentasi .....	113



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut Mariun (1979) Dengan otonomi daerah tersebut kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daerah.

Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pendapat tentang otonomi di atas, juga sejalan dengan yang dikemukakan Vincent Lemius bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan.

Kualitas otonomi daerah ditentukan pada keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerahnya sendiri sehingga dengan sendirinya aspirasi masyarakat akan muncul sejak dini. Keterlibatan aktif masyarakat inilah yang akan membuat pencapaian pembangunan berhasil pada daerahnya. Keinginan

aspirasi masyarakat tersebut akan mewujudkan pembangunan yang berupaya mengerakkan kondisi masyarakat secara keseluruhan untuk yang lebih baik.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat. Pembangunan menjadi proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat.

Dasar proses partisipasi masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kesadaran mereka untuk menjadi lebih baik. Proses menggunakan dan mengakses sumber daya setempat dengan sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrumen yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan

potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. Jadi keikutsertaan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan akan memberikan sumbangan yang besar bagi masyarakat itu sendiri, karena akan memberikan manfaat dari diberlakukannya suatu kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat.

Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat daerah. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan disiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu dalam pembangunan harus melibatkan semua pihak yang di dalamnya bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan yang beragam.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat memberikan arti bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping kita juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Dengan kata lain, bahwa aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang kurang dirasakan oleh masyarakat, adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengertian artikulasi aspirasi ini, antara lain dapat diwujudkan dengan mengikut-sertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan atau proses pembuatan rencana pembangunan dan secara tidak langsung dimana kebijakan-kebijakan tersebut sudah merupakan artikulasi aspirasi atau perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan yang sedang dirasakan oleh masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama. Tanpa melibatkan masyarakat pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat dan pengalihan dana pembangunan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

**Tabel 1.1.**

Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten  
Karo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.1 Pekerjaan Umum</b>						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	37,28%	61,06%	62,06%	63,36%	61,65%
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,003072	0,003021	0,003143	0,003097	0,00293
3.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	71,38	73	73	73,58	73,58
4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	52	54	46,7	48	49,61
5.	Rasio jaringan irigasi (panjang saluran irigasi/luas lahan budidaya pertanian)	80	80	80	55	55
6.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	61,42	63,06	68	68,7	68,7
7.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	0,00261	0,00256	0,00281	0,00275	0,00298
<b>1.2 Penataan Ruang</b>						
1.	Luasan RTH publik wilayah kota/kawasan perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%
2.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2021*

Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Karo belum berjalan dengan baik, dapat dilihat dari table di atas, pada suburusan jalan, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu 37,28% menjadi 63,36%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya 2 (dua)

ruas jalan dalam kondisi baik yang kewenangannya dialihkan dari kewenangan kabupaten menjadi provinsi. Di sisi lain, pada suburusan sumber daya air menunjukkan rasio jaringan irigasi berada pada persentase 55%, bahkan terjadi penurunan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 54% pada tahun 2017 menjadi 46,7% pada tahun 2018, namun kembali berangsur meningkat dan pada tahun 2020 menjadi 49,61%. Sementara itu, untuk persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan sedikit peningkatan dari 71,6% di tahun 2016 menjadi 73,58 % di tahun 2020. Untuk tingkatan penduduk berakses air minum, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu 60,63% tahun 2016 menjadi 68,7% pada tahun 2020.

Rumah Berastagi merupakan salah satu kelurahan/desa yang ada di kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara. Desa ini merupakan salah satu desa yang terbesar yang ada di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Sehingga desa ini menjadi salah satu desa yang menjadi sasaran pembangunan. Berdasarkan pengamatan awal penulis terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo belum terkoordinasi secara optimal oleh aparat pemerintah penyelenggara pembangunan, sehingga penyelenggara pembangunan di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo belum didukung oleh pertumbuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat masih banyaknya fasilitas-fasilitas pelayanan umum yang belum diperbaiki seperti jalan raya dan jembatan, sarana dan prasarana teknis lainnya.

Kondisi pembangunan di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo belum mencapai tujuan pembangunan nasional. Rendahnya tingkat pertumbuhan pembangunan yang terdapat di Desa tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dengan kurangnya sosialisasi dan koordinasi tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa.

Pemerintah desa Rumah Berastagi dalam melakukan proses pembangunan pada tahun 2020 sampai 2021 tidak banyak melakukan pembangunan dimana semua anggaran APB Desa dialihkan ke dana BLT atau Bansos. Dimana pada saat itu banyak yang masyarakat yang merasakan sulitnya ekonomi pada masa pandemic covid-19. Sehingga pembangunan yang sudah direncanakan harus tertunda akibat dari adanya pandemi ini sehingga pemerintah Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo lebih mengutamakan penggunaan anggaran dana desa dialihkan ke program BLT dan Bansos. Dan proses pembangunan tetap berjalan dalam skala kecil, seperti pembangunan gorong gorong, pembuatan paving blok di beberapa dusun sehingga pembangunan di desa ini tetap berjalan.

Sejauh ini, partisipasi masyarakat Desa rumah Berastagi masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan pengambilan keputusan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat Desa rumah Berastagi dalam pembangunan yaitu kurangnya pengetahuan tentang politik, kurangnya

sosialisasi aparat pemerintahan terhadap masyarakat Desa rumah Berastagi, sibuknya masyarakat, rendahnya pendidikan, dan kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam mengeluarkan gagasan tentang pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul penelitian yang akan di ambil penulis: **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk itu peneliti akan memperjelaskan masalah-masalah yang terjadi di Desa Rumah Berastagi. Yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Untuk memperkaya dan menambah pengetahuan dalam bidang administrasi publik tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

2. Secara Praktis

Sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Partisipasi Masyarakat

##### 2.1.1 Pengertian Partisipasi

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi.

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping itu juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P

Siagaan bahwa penggerak adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien seta ekonomis.

Mulyadi (2009) mengatakan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis partisipasi menurut mulyadi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan. Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.
2. Partisipasi di dalam pelaksanaan.

Merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi

dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.

3. Partisipasi di dalam kemanfaatan.

Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi,

4. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi.

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi

“Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Salusu (1998) Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Juliantara (2002) Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. Juliantara, (2002).

### 2.1.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Menurut antropolog Elman Service, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat, masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta stratifikasi sosial, yaitu: kawanan, suku, kedatuan, dan negara. Jenis masyarakat paling kecil atau kawanan biasanya hanya terdiri atas beberapa kelompok, banyak diantaranya merupakan kumpulan dari satu atau beberapa keluarga besar.

Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Kriteria interaksi antarmanusia dijabarkan sebagai berikut:

1. Harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu.

2. Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
3. Ada dimensi waktu (lampau, kini, mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung.
4. Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat.

Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Elly M. Setiadi (2006)

Masyarakat setempat merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat dengan tempat. Elly M. Setiadi (2006).

Fairchild dalam Elly M. Setiadi (2006) unsur atau ciri-ciri masyarakat terdiri dari 5 yaitu:

1. Kelompok Manusia
2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama
3. Adanya pertahanan dan kekalan diri
4. Adanya kesinambungan
5. Adanya hubungan pelik diantara anggotanya

Karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan.

Menurut Selo Soemardjan (dalam Jacobus Ranjabar, 2006) masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. Selo Soemardjan (dalam Jacobus Ranjabar, 2006) mengatakan bahwa unsur-unsur masyarakat ada 4 yaitu :

1. Manusia hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada.
2. Bercampur untuk waktu yang lama
3. Mereka merupakan suatu system hidup bersama.

### **2.1.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

Arif Budiman dalam Tjokroamidjojo (1990) bahwa dalam menggerakkan partisipasi rakyat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formil yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimitas.

Menurut Windardi (2000) partisipasi adalah turut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.

Seperti dimaklumi dalam kegiatan atau aktivitasnya tujuan masyarakat yang mulia, baru akan tercapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab dalam partisipasi terdiri atas :

1. Partisipasi dapat dipaksakan dan dapat pula suka rela.
2. Partisipasi dapat formal dan informal.
3. Partisipasi dapat bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Untuk menumbuhkan dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya. Ndraha, (2000).

Usaha-usaha tersebut adalah seperti dibawah ini :

1. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
2. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.
3. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Organisasi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Ada beberapa aspek penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti yang dikatakan oleh Tjokroamidjojo (1990). Aspek penting dalam rangka partisipasi ada empat aspek yaitu:

1. Terlibat dan ikut sertanya tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik sesuai Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.

2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik yang berencana.
4. Adanya perumusan dan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana.

Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Ndraha, (1990). Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya

Berkaitan dengan beberapa pendapat seperti diatas, maka apapun upaya yang dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah beberapa syarat agar masyarakat dapat melaksanakan partisipasi tersebut.

#### 2.1.4 Tingkatan partisipasi masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Mengukur partisipasi masyarakat, Wilcox berpendapat tingkat partisipasi dapat diukur dengan lima tahapan berupa

1. Memberikan Informasi (*information*) dimana terciptanya kondisi masyarakat yang saling berbagi informasi berupa ajakan serta bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipan.
2. Konsultasi (*consultation*); yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*); dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak bersama (*acting together*); dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Memberikan dukungan (*supporting*) dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

### 2.1.5 Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

Dukungan pemerintah khususnya Desa merupakan salah satu faktor utama terciptanya partisipasi pembangunan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Sumodiningrat menyatakan bahwa Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Siagian, peranan pemerintah dalam mendukung pembangunan yang mengedepankan partisipatif terlihat dalam lima wujud utama yaitu:

1. Sebagai Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
2. Sebagai Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya

mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Sebagai Dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap cara bekerja yang baik serta dapat dijadikan sebagai panutan bagi masyarakat dalam melaksanakan sebuah kegiatan.
4. Sebagai Stabilisator, yang bertujuan untuk menjaga kesetabilan agar tetap stabil dan terkendali, sehingga proses perancangan hingga pelaksanaan kebijakan dapat direalisasikan dengan baik serta peluang keberhasilan sebuah program dapat lebih meningkat, terarah dan lancar.
5. Sebagai Pelopor, dalam hal ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai perumus kebijakan ataupun perancang sebuah pembangunan, namun juga berperan sebagai implementor pembangunan yang inovatif serta mampu memberikan solusi dalam menghadapi tantangan dan keterbatasan.

Keberhasilan program pengentasan kemiskinan yang menggunakan prinsip partisipasi pembangunan, menunjukkan bahwa faktor partisipasi menjadi faktor penting dan dominan. Partisipasi dalam pengertian keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam seluruh rangkaian proses pengentasan kemiskinan, mulai dari identifikasi masalah, kebutuhan, hingga pada pemanfaatan hasil pembangunan. Beberapa faktor

yang menentukan keberhasilan program pembangunan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan ialah kesadaran akan nilai-nilai lokal, Pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh dan Pengembangan sumberdaya manusia.

### 2.1.6 Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson adalah ketergantungan. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan hambatan dalam mewujudkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara aktif, karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri. Faktor penghambat partisipasi tersebut dapat kita dibedakan berupa faktor internal dan faktor eksternal.

1. Penghambat Internal Partisipasi berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri. Perilaku setiap individu sangat berhubungan hingga dipengaruhi oleh ciri-ciri sosiologis contohnya seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, jenis pekerjaan, besarnya penghasilan dan lamanya menjadi anggota masyarakat sangat mempengaruhi masyarakat dalam melibatkan diri pada setiap kegiatan pembangunan khususnya dalam perlibatan partisipasi pembangunan.
2. Penghambat Eksternal Partisipasi pengaruh eksternal yang dimaksud ialah stakeholder. Pada kondisi ini stakeholder yang

memiliki kepentingan pada suatu program cenderung dilakukan oleh pemerintah daerah, pengurus desa atau kelurahan, tokoh masyarakat dan konsultan atau fasilitator. Seluruh tingkatan jabatan yang berkepentingan saling bersaing menjadi siapa yang memiliki pengaruh besar dalam mendesain sebuah program atau memiliki posisi penting dalam menentukan kesuksesan sebuah program.

Persoalan partisipasi masyarakat pada pembangunan khususnya di Desa, secara umum menghadapi kendala dimana masyarakat dihadapkan dengan beragam realitas hidup masing-masing. Santoso Sastropetro menyebutkan ada tiga faktor yang menghambat masyarakat Desa untuk berpartisipasi pada pembangunan di Desa, yaitu:

1. Rendahnya kualitas pendidikan

Sarana pendidikan masyarakat di Desa cenderung rendah. Masyarakat di Desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabilah setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus.

2. Tingkat pendapatan yang rendah

Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan riil. Pendapatan yang rendah mengakibatkan low saving, dan low invesment, dan rendahnya pembentukan modal. Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang akhirnya kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat diolah, dan seterusnya sehingga merupakan lingkungan yang tidak berujung pangkal.

### 3. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilanya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencarian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor pertanian usaha bidang pertanian.

## 2.2 Konsep Pembangunan Infrastruktur

### 2.2.1. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan

sempurna dari keadaan yang sebelumnya untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. Subandi (2011)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rochajat,dkk(2011) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow dalam Abdul (2004) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011)

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok; pertama, masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua, masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangun. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia; manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif ini manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan juga pada hakekatnya adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu keberlanjutan (*continuity*) dan perubahan (*change*), tarikan antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Akan halnya kecenderungan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia (Wrihatnolo dan Dwijiwinoto (2007) mengemukakan adanya tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Strategi pertumbuhan
2. Pertumbuhan dan distribusi
3. Teknologi tepat guna
4. Kebutuhan dasar
5. Pembangunan berkelanjutan dan
6. Pemberdayaan

Trasnformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembagunan yang dilalui oleh semua neagara. Rostow mengemukakan lima tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya; yaitu;

1. Masyarakat teradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modren, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan perternakan.
2. Persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modren untuk menuju negara industri.
3. Tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan disektor industry
4. Masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modren untuk melakukan semua aktivitas ekonominya.
5. Masa tingginya komsumsi masyarakat merupakan masyarakat memiliki tingkat komsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa.

Teori pembangunan dalam perkembangannya semangkin kompleks dan semangkin tidak terikat pada satu disiplin ilmu dinamika teori pembangunan tersebut tidak terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka. Pengalaman selama ini menunjukan

bahwa implementasi konsep pembangunan ternyata telah banyak merubah kondisi kehidupan masyarakat. Pada sebagian komunitas, pembangunan telah mengantar kehidupan mereka lebih baik bahkan ada sebagian yang dapat dikatakan berlebihan, sementara bagi komunitas lainnya pembangunan justru mengantarkan kesengsaraan. Oleh karena itu pemahaman masalah pembangunan hendaknya harus bersifat dinamis, karena setiap saat kan selalu muncul masalah-masalah baru yang harus dipecahkan oleh pembangunan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa akan selalu ada pemecahan atas setiap masalah, tetapi juga selalu ada masalah atas setiap pemecahan masalah.

### **2.2.2 Konsep Infrastruktur**

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya

penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

### 2.2.3 Konsep Pembangunan Infrastruktur

Menurut Sondang P.Siagian(2005) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

1. Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
2. Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
3. Lebih dipandang sebagai sebuah service (*considered a service*), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam *support*, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (*device*) fisik.

4. Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
5. Terpisah (*distinct*) dari struktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Kuncoro (2010), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Infrastruktur kerap dipahami oleh kaum awam sebagai sarana dan prasarana, secara teoritis pengertian infrastruktur, dimana infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat.

Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). Dari pandangan Kodoatie tersebut bisa dipahami pembangunan desa akan mudah tercapai bilamana telah terpenuhinya infrastruktur di pedesaan sebagai media pendukung dari upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan desa.

Kodoatie (2005) mengungkapkan infrastruktur sebagai pendukung utama sistem sosial dan sistem ekonomi dilaksanakan dalam konteks keterpaduan dan menyeluruh. Infrastruktur yang merupakan fasilitas yang dikembangkan untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan nilai optimasi pelayanan infrastruktur itu sendiri.

Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana hasil pembangunan tersebut memang benarbenar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

### 2.3 Konsep Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, deca yang berartitanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.

H.A.W. Widjaja (2009) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Sedangkan pengertian desa menurut UU Nomor 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dikutip dari beberapa jurnal dan skripsi:

**Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul	Metedologi	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Adam Latif at al,Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur	Metode penelitian yang digunakan adalah	Tingkat partisipasi masyarakat di desa tersebut dalam	Perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul	Metedologi	Hasil Penelitian	Perbedaan
	di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidengreng Rappang,	metode deskripsi penelitian kuantitatif	pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik.	dengan penelitian ini yaitu lokus pada termpat penelitian ,dan menggunakan metode yang berbeda serta hasil yang di dapat oleh peneliti berbeda karna pada penelitian Tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup baik.
2.	Nurul Hayati , Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur.	Metode yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif yang menjelaskan tujuan dan kejadian yang ada di desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan infrastruktur di desa tersebut sudah cukup .baik dengan kontribusi dari masrakat	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokus pada termpat penelitian.
3.	Andi Ripai ,Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene kabupaten Kepulauan Selayar,	Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur cukup baik diukur dengan tingkat partisipasi mansyarakat melalui ide,uang,materi dan tenaga	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokus pada termpat penelitian ,dan menggunakan metode yang berbeda.

No.	Nama dan Judul	Metedologi	Hasil Penelitian	Perbedaan
4.	Refiyana ,Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa: Scoping Review	Metode penelitian yang digunakan adalah metode scoping review	Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sangat didominasi menggunakan teori menurut Cohen dan Uphoff dengan tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sangat mendominasi dalam proses pembangunan, faktor kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tahapan pembangunan infrastruktur desa mulai dari perencanaan sampai evaluasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan Pembangunan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokus pada termpat penelitian ,dan menggunakan metode yang berbeda.
5.	Ibran S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi penelitian kualitatif.	partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan tergolong cukup baik atau tinggi. Hal ini terjadi karena masyarakat sangat antusias untuk ikut berpartisipasi, baik itu dalam dalam perencanaan program pembangunan maupun tahap dalam pelaksanaan program pembangunan dan Dalam rangka pelaksanaan dalam pembangunan di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan secara umum cukup baik, dimana setiap	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lokus pada termpat penelitian ,dan menggunakan metode yang berbeda.

No.	Nama dan Judul	Metedologi	Hasil Penelitian	Perbedaan
			pembangunan yang di lakukan pemerintah Desa Lerepako selalu diberitahukan dan disosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu, selain itu pembangunan-pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa Lerepako juga sangat melibatkan masyarakatnya.	

*Sumber : Peneliti 2022*

## 2.5 Kerangka Berfikir Peneliti

Menurut Uma (Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah penting. Dengan demikian kerangka maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang paling melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman mendasar dan pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari penelitian yang akan dilakukan. Partisipasi asyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan pada umumnya.

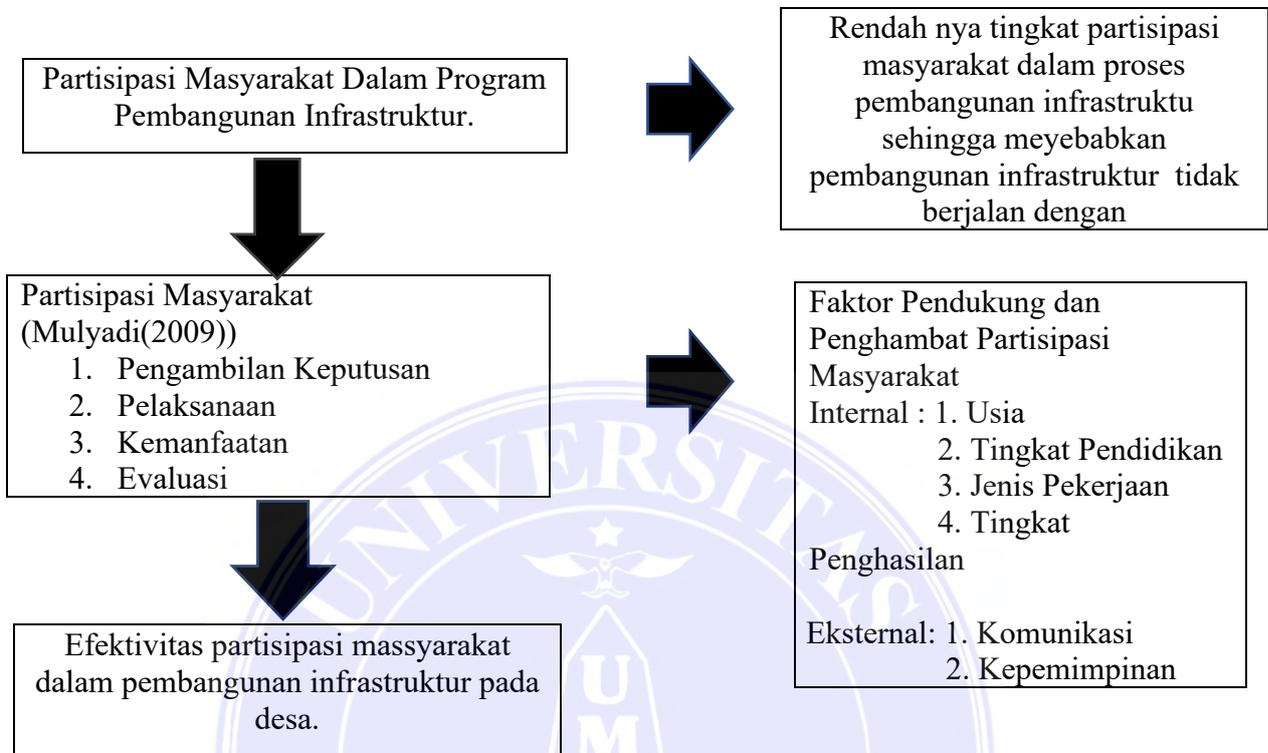
Sehubungan dengan teori dan konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh, Mulyadi (2009) menyebutkan bahwa didalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya

yaitu, Partisipasi di dalam pengambilan keputusan, Partisipasi di dalam pelaksanaan, Partisipasi di dalam kemanfaatan, Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi.



**Gambar 2.2**

Kerangka berfikir peneliti



Sumber : Peneliti, 2022

## 2.6 Defenisi Konsep dan Fungsional

Untuk mempermudah jurnalisi dalam menguraikan dan menelaah hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam menentukan subyek wawancara, diperlukan perhitungan dan makna fungsional faaktor. Dalam penelitian ini, defenisi konseptual dan fungsional variabel sebagai berikut :

### 2.6.1 Defenisi Konsep

#### 1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang mereka bergabung dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam bentuk menyumbang uang, pikiran dan tenaga menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu persyaratan pertama untuk keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

## **2. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari struktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (service). Dalam dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon.

## 2.6.2 Defenisi Operasional

1. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan. Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.

2. Partisipasi di dalam pelaksanaan. Merupakan keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.

3. Partisipasi di dalam kemanfaatan. Merupakan wujud dari peran masyarakat dalam keikutsertaan berpartisipasi di desanya. Apakah keikutsertaannya tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan

keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi,

4. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi.

Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018).

Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Di samping itu juga akan dibahas tentang faktor apa saja yang menghambat dan pendukung pelaksanaan program tersebut

### 3.2. Fokus penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti tentang partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dan mengamati faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo.

### 3.3. Informan Penelitian

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik Purposive Sampling, dimana penelitian dilakukan dengan krtiretia yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Hamid Patilama, 2013). Selain itu menurut Hamid Patilama (2013:), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1.	Pebrisiswanta Purba	Kepala Desa	1	Informan Kunci
2.	Herdison Surbakti	Sekretaris Desa	1	Informan Utama
3.	Iskandar A Purba	Sekretaris BPD	1	Informan Utama
4.	Deking Ginting	Kepala Dusun	1	Informan Tambahan
5.	Muhammad Syafii S.Sos.I	Warga	1	Informan Tambahan
6.	Adi	Warga	1	Informan Tambahan
7.	Roy Marjuki	Warga	1	Informan Tambahan

*Sumber peneliti 2023*

Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informan Kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi mendasar yang diperlukan untuk penelitian. Kepala Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, menjadi sumber informasi utama penelitian ini.

2. Informan Utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang menjadi subjek penelitian. Sumber informasi utama penelitian ini adalah Sekretaris Desa, dan BPD.

3. Informan Tambahan

Individu atau kelompok yang dijadikan sebagai isu sekunder atau sumber data dalam memberikan gambaran pendukung tentang asal usul data primer yang berkaitan dengan isu penelitian disebut sebagai informan tambahan. Warga merupakan indorman tambahan dalam penelitian ini.

### 3.4. Teknik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014). Adapun tehnik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik obeservasi. Observasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiyono. 2018)

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, “ *interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* ”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diiteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal lain dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life Histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018).

### 3.5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep Milles dan Huberman (Sugiyono, 2018) tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut diantaranya yakni:

1. Pengumpulan Data

Peneliti akan mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan observasi dan wawancara di lapangan. Seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing-masing. Data yang sudah terkumpul dapat ringkas atau rangkuman yang akan dianalisis dan dijadikan sebagai data penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah hal-hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan penelitian yang kemudian dilakukan penggolongan kedalam dua bagian yaitu: Kepala Desa atau Aparatur Desa dalam memutuskan

pelaksanaan program pembangunan dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Sementara data-data yang sekiranya tidak ada hubungannya dengan permasalahan penelitian tidak dimasukkan dalam hasil penelitian agar mudah dalam penarikan kesimpulan.

### 3. Penyajian Data

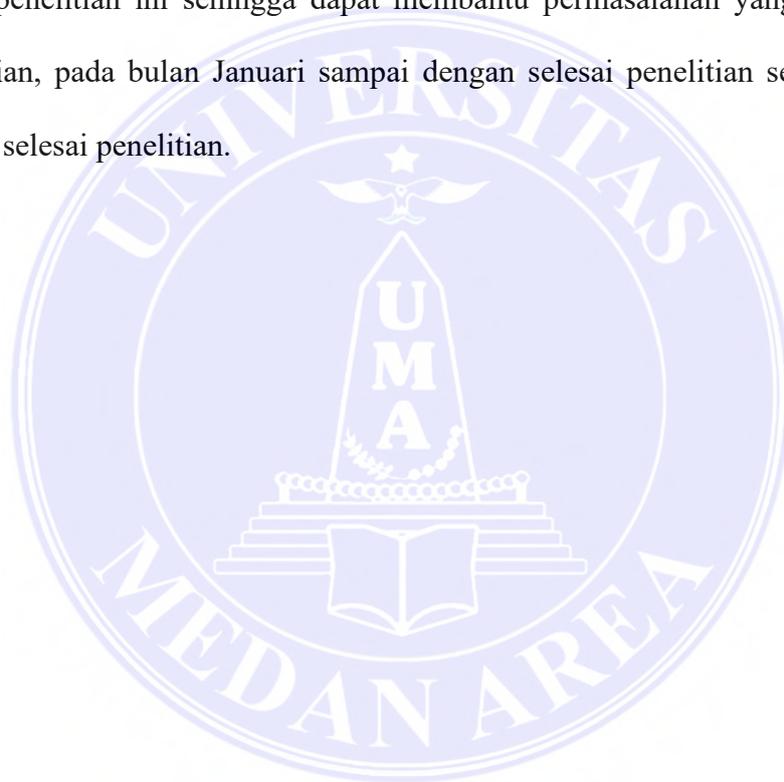
Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang akan dipergunakan sebagai bahan laporan. Dalam penyajian data ini dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar, keterkaitan serta tabel. Penyajian ini memberi kemungkinan mengadakan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi dilapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

### 3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Desa rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa bahwa desa ini merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Berastagi yang tingkat partisipasi masyarakat nya msih tergolong rendah. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada dilokasi penelitian, pada bulan Januari sampai dengan selesai penelitian secara bertahap hingga selesai penelitian.



**Tabel 3.2 Jadwal Penelitian**

Jenis Kegiatan	Tahun														
	2022		2023										2024		
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Nov	Des	Jan	Feb
Penyusunan Proposal	■														
Seminar Proposal		■													
Revisi			■	■	■	■	■	■	■						
Penelitian			■	■	■	■	■	■	■	■					
Penyusunan Skripsi										■	■	■			
Seminar Hasil												■			
Bimbingan Skripsi													■	■	
Sidang Meja Hijau															■

*Sumber peneliti 2023*

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrasturuktur desa sudah dapat dikatakan baik jika dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam bermusyawarah, dan mengevaluasi. Namun jika dilihat dari pelaksanaan dan kemanfaatan, masyarakat belum bisa di bilang baik sebab masih ada rasa tidak peduli dengan pembangunan yang sedang dijalankan maupun yang sudah di bangun pada desa ini serta dipengaruhi oleh kesibukan masing –masing pada setiap masyarakatnya.

Faktor pendukung dan penghambat ‘Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrasturuktur desa yaitu masih ada nya kesadaran dari masyarakat itu sendiri serta dukungan dari pihak pemerintahan desa yang memberikan ruang dan wadah kepada masyarakat untuk ikut dalam proses partisipasi yang merupakan faktor pendukung dari Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrasturuktur desa, sedangkan faktor penghambat dari Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrasturuktur desa ialah masyarakat yang memiliki kesibukan seperti buruh pekerja yang membuat masyarakatnya tidak bisa ikut berpartisipasi.

#### 5.2 Saran

Partisipasi merupakan hal terpenting dalam menyukkseskan suatu kegiatan. Mengingat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo masih rendah maka peneliti merekomondasi hal sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat diharapkan memberikan arahan atau tentang pentingnya berpartisipasi dalam sebuah pembangunan infrastruktur yang ada di Desa.
2. Pemerintah Desa Rumah Berastagi di harapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan cara mendorong pemerintah kabupaten untuk mempercepat realisasi anggaran lebih cepat.
3. Warga masyarakat Desa Rumah Berastagi perlu lebih mendukung (berpartisipasih) dan bisa lebih memahami tentang pentingnya pembangunan infrastruktur di Desa Rumah Berasstagi agar dengan lebih antusias dan lebih partisipatif dalam keterlibatan menjalankan pembangunan infrastruktur desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Hadi, A. P. 2015. Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987.
- Haliim, W. 2020. Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1).
- Hayati, N. 2017. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. *Administrasi Negara*.
- Mulyana, S. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. *Ilmu Administrasi Negara*.
- Nurwanda, A. 2016. partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik (studi analisis kebijakan pemerintah desa). *Ilmu Pemerintahan*.
- Pangemanan, S. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Singsong Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Rahman, K. 2016. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(1).
- Watson dalam Deviyanti, D. 2013. Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.1, No.2.

### Buku

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Dadang Juliantara. 2002. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2021
- Elly M Setiadi. 2006. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Kencana Prenada Group : Jakarta
- Grigg, N., and Fontane, G., 2000. *Infrastructure System Management & Optimization, Internasional Seminar Paradigm & Strategy of Infrastructure Management*, Civil Engeenering Departement Diponegoro University.

- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: FISIP IU Press.
- Juliantara, Dadang. 2004. *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*, (Pembaruan, Yogyakarta: Pembaruan
- Lemius, Vincent. 1986. *Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Binapura Aksara)
- Kodoatie, Robert J. 2005 "Pengantar manajemen infrastruktur / Robert J. Kodoatie" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, Mudrajad, 2010, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Fokusmedia, Jakarta.
- Mariun. 1979. *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Sospol UGM,.
- Mulyadi. 2009. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: STIE YPKPN.
- Ndraha, T. 1990. *Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta:
- Patilima, Hamid. 2013. "Metode Penelitian Kualitatif, cet. empat." *Bandung: alfabeta*
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia : Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- RPJM Desa Rumah Berastagi 2022
- Rochajat, Harun dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salusu.1998. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Grasindo
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1985, *Metode Penelitian dan Survei LP3ES*, Jakarta.
- Setiadi, Elly M. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sondang P. Siagian. 1977. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rhineka Cipta, Jakarta. 1994. 192 Terry G.R. *Principle Of Management*. (New York: Richard.D. Irwin, Inc.)
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D)*. Bandung: IKAPI
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. alfabeta.

Sumodiningrat, G, 1999, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tjokroamidjojo, 1996. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES

Widjaja, H. A. W. 2009."Pemerintahan Desa/Marga,(Jakarta: PT." *Raja Grafindo Persada* .

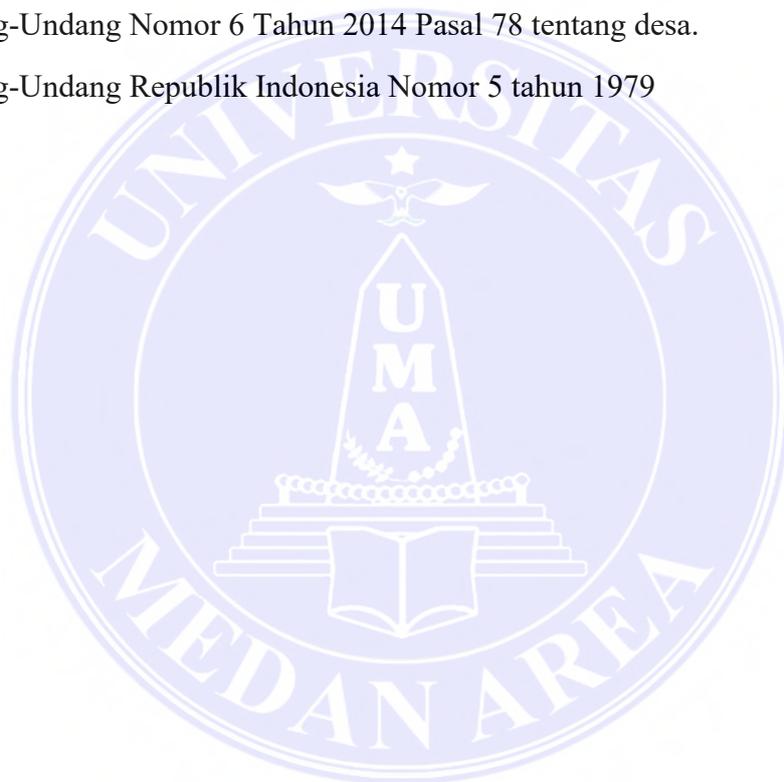
Winardi. 2000, Kepemimpinan dalam manajemen Jakarta, Rineka Cipta

### **Perundang undangan**

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979



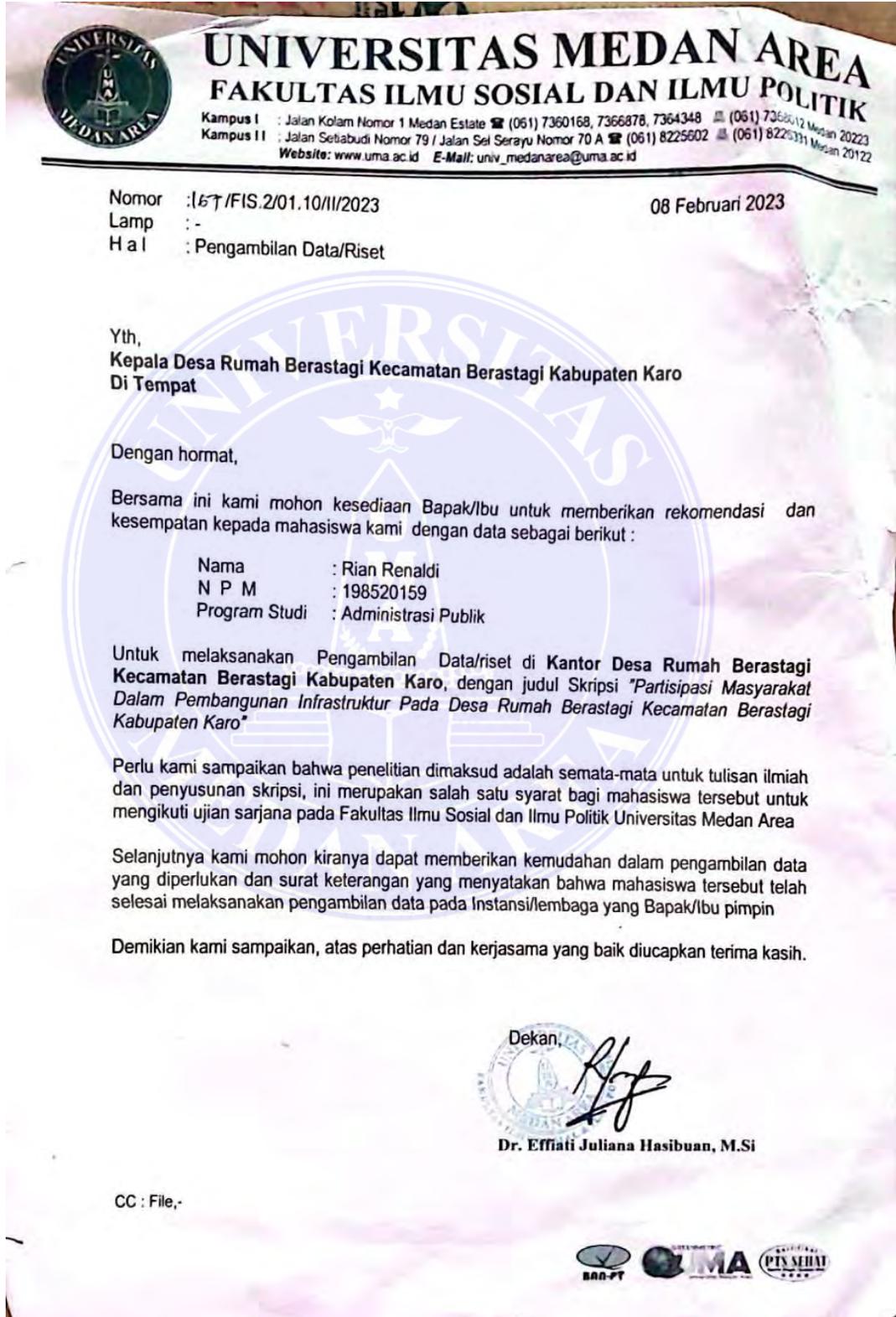
## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara**

1. Bagaimana ide partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
2. Bagaimana pendapat masyarakat dalam partisipasi pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
3. Bagaimana Kontribusi Masyarakat dalam partisipasi tenaga untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
4. Bagaimana Kontribusi Masyarakat dalam partisipasi dana dan bahan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat menggunakan dan merawat dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
6. Bagaimana partisipasi masyarakat memberi penilaian dalam evaluasi pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
7. Bagaimana partisipasi masyarakat memberi kritik dalam evaluasi pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat memberi saran dalam evaluasi pembangunan infrastruktur pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?
9. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda di Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo ?

## Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

1. Surat izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7366012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8225331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 167 / FIS.2/01.10/II/2023  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

08 Februari 2023

Yth,  
Kepala Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo  
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Rian Renaldi  
N P M : 198520159  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, dengan judul Skripsi "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



2. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Kantor Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
KECAMATAN BERASTAGI  
KANTOR KEPALA DESA RH. BERASTAGI**

Nomor : 20 /RB-III/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin penelitian

Berastagi, 9 Maret 2023  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area  
di-  
Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik , Universitas Medan Area Nomor : 167/FIS.2/01.10/II/2023 hal ijin penelitian tanggal 08 Februari 2023 untuk keperluan penulisan skripsi tingkat sarjana (S-1) dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa yang bernama dibawah ini :

Nama : **RIAN RENALDI**  
Nim : 198520159  
Program Studi : Admisnistrasi Publik  
Judul Skripsi : " Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo"

Dengan ini memberikan ijin penelitian kepada nama tersebut diatas untuk melakukan penelitian di Desa Rumah Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo.  
Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian nya kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA DESA  
RUMAH BERASTAGI**  
  
**PEBRISIWANTA PURBA**

3. Surat Keterangan Waktu Penelitian Dari Kantor Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo

**PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO**  
**KECAMATAN BERASTAGI**  
**KANTOR KEPALA DESA RUMAH BERASTAGI**

---

**SURAT KETERANGAN**  
No : 203 /SK/RB-VII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **PEBRISISWANTA PURBA**  
Jabatan : **KEPALA DESA RUMAH BERASTAGI**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIAN RENALDI**  
NPM : 198520159  
Jurusan : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial Politik  
Asal Perguruan Tinggi : Universtas Medan Area

Selanjutnya diterangkan bahwa :

1. Bahwa Nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian di Desa Rumah Berastagi mulai dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo"
2. Demikianlah surat keterangan ini diperbuat agar dipergunakan seperlunya.

Berastagi, 10 Juli 2023

**PEBRISISWANTA PURBA**

CS Dipecahkan dengan CamScanner

## LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI

### 1. Kantor Desa Rumah Berastagi



**Gambar 5.1 Kantor Kepala Desa Rumah Berastagi**  
(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)

## 2. Kondisi Jalan di Desa Rumah Berastagi



**Gambar 5.2 Kondisi Jalan Desa Rumah Berastagi**

*(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)*



**Gambar 5.3 Kondisi Jalan Kabupaten di Desa Rumah Berastagi**

*(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)*

### 3. Infrastruktur Lainnya



**Gambar 5.4 Jamburtaras (Aula atau Jambur) di Desa Rumah Berastagi**  
(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)



**Gambar 5.5 Sarana Olahraga di Desa Rumah Berastagi**  
(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)



**Gambar 5.6** Gapura Desa Rumah Berastagi

*(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)*



**Gambar 5.7** Tempat Pembuangan Sampah di Desa Rumah Berastagi

*(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)*

#### 4. Dokumentasi Wawancara



**Gambar 5.8 Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Desa**

*(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)*



**Gambar 5.9 Dokumentasi Wawancara Bersama Sekretaris Desa**

*(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)*



**Gambar 5.10 Dokumentasi Wawancara Bersama Sekretaris BPD**

*(Sumber: Dokumen pribadi, 2023)*